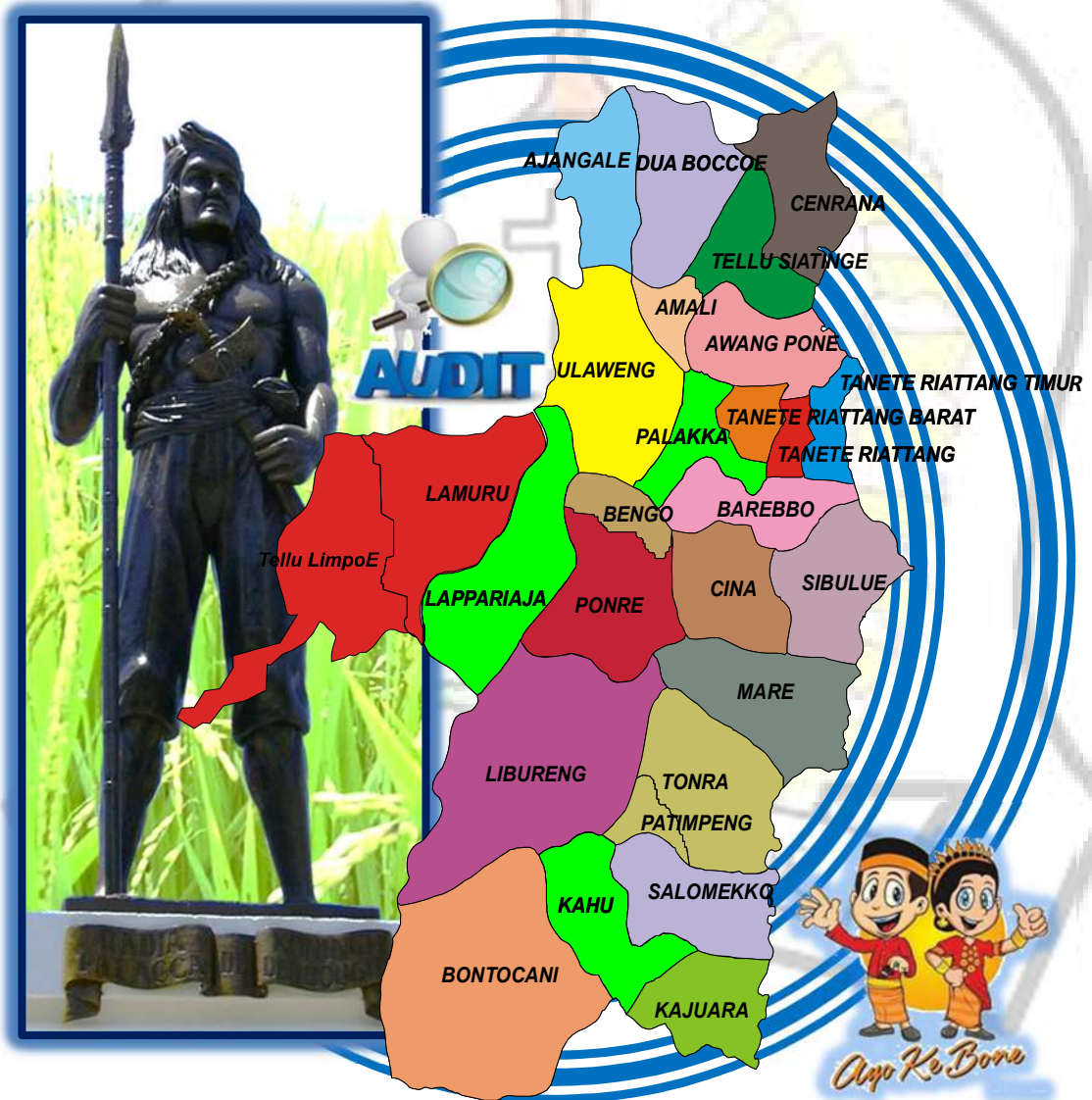




PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022





BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Inspektorat Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja Tahun 2022 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Dalam perjalanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021, terdapat kondisi dan dinamika pembangunan nasional yang mendorong dilakukannya Perubahan terhadap Rencana Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah, baik RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah inilah yang kemudian menjadi acuan dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone pada Tahun 2022 nanti.



Dengan adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka keselarasan antar dokumen perencanaan baik secara vertikal maupun horizontal menjadi sebuah kewajiban. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 beserta Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Perencanaan kinerja yang berbasis teknologi informasi (IT) kedepannya juga sudah menjadi tuntutan jaman yang harus dilakukan dan terus dikembangkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (*e-government*), sehingga penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai serta SDM yang kompeten, menjadi salah satu kunci utama keberhasilan perencanaan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Selain itu, salah satu tantangan yang kedepannya perlu mendapat perhatian adalah pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam upaya penanganan kesehatan beserta pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi "*new normal*" setelah meluasnya pandemik wabah Virus COVID-19 sejak akhir tahun 2019 dan masih berdampak hingga saat ini.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2022 ini menjadi media perencanaan kinerja yang dapat menjawab tantangan tersebut, dan lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah pada Tahun 2022 guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 29 Juli 2021



INSPEKTUR DAERAH,

DR. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19680725 199303 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR & TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah	54
4.2. Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	56
BAB V PENUTUP	65

LAMPIRAN :

1. Cascading Kinerja Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022
2. Rumusan Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 (Cetakan SIPD)



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	3
Tabel 1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2020 (mengacu ke Renstra Pokok Tahun 2018-2023)	10
Tabel 1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2021 (mengacu ke Renstra Perubahan Tahun 2018-2023)	15
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (setelah Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)	26
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 dan 2022 (setelah Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)	29
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023 (setelah Perubahan Renstra Tahun 2018-2023)	33
Tabel 4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 - Inspektorat Daerah	39
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 – Inspektorat Daerah	52
Tabel 6	Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2021 Dan Proyeksi Tahun 2022	54
Tabel 7	Rumusan Rencana Program & Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 - Inspektorat Daerah Kab. Bone	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

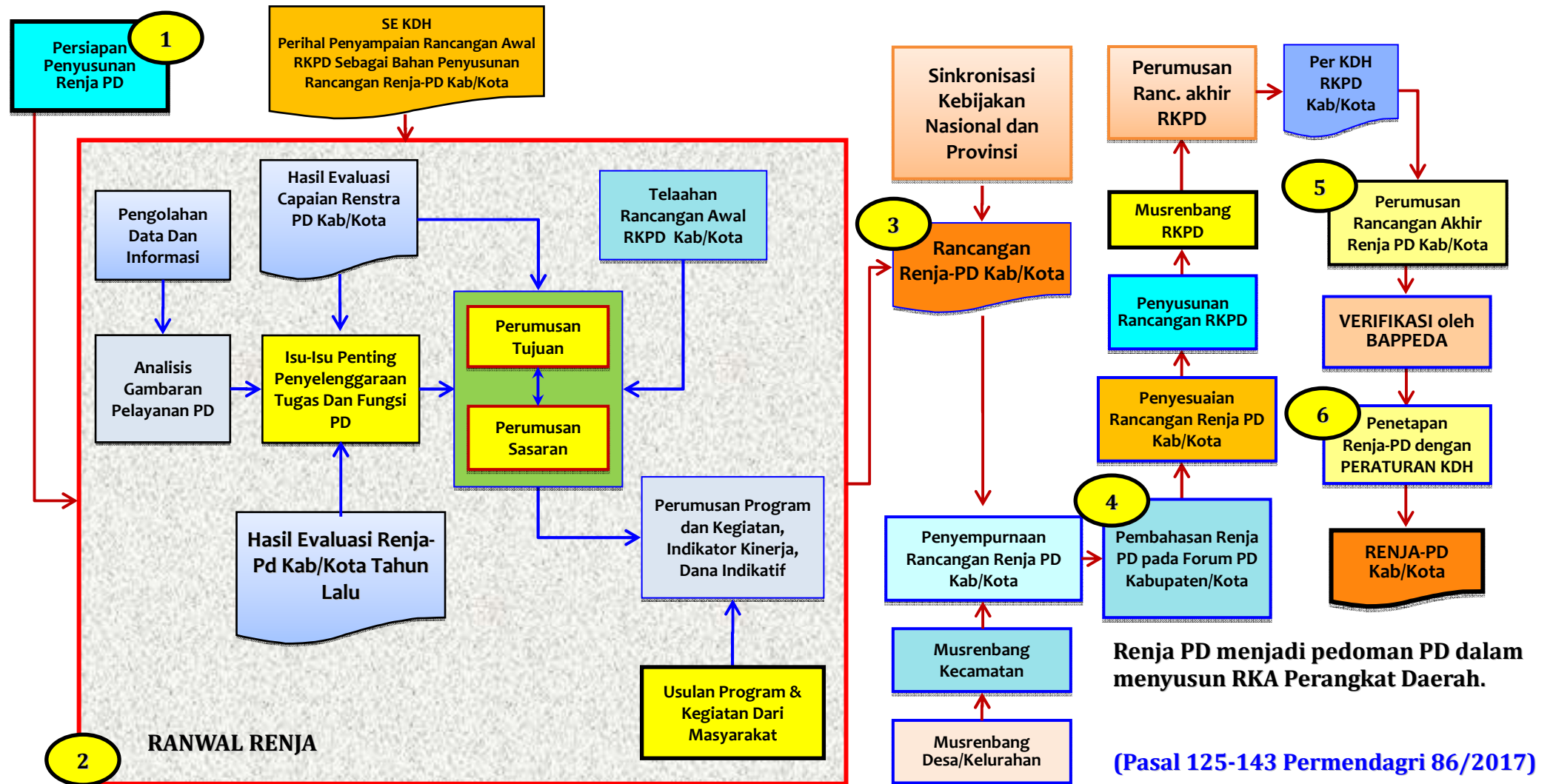
Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan subansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)





1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 41 Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2022.



1.3. Maksud dan Tujuan

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.



1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2021), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023.

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah hingga tahun 2020 mengacu pada Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2021 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020 oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2020 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2021.



Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja hingga tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2021, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2020 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2021, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2020 (mengacu ke Renstra Pokok)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020																			
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																		
1				2				3				4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
1				Urusan Wajib																								
1	20			Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian																								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	99 %	100 %	103 %	103 %	-	101 %	101 %															
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	100 %	-	72 Paket	40,00 %															
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	69 Orang	11 Orang	14 Orang	14 Orang	100 %	-	25 Orang	35,51 %															
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	-	8 Paket	40,00 %															
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	-	24 Paket	40,00 %															
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	57 Kegiatan	114 %	-	107 Kegiatan	43,32 %															
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	100 %	-	72 Paket	40,00 %															
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	97 %	100 %	97 %	97 %	-	98,50 %	98,50 %															
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan : - Mobil - Sepeda Motor	(22 Unit) - 10 Unit - 12 Unit	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	-	-	-	-	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	13,64 %															



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1200207	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - TV - Sound System Ruangan - Mic Wireless - Loudspeaker Mobile - AC - Pompa Air - Vacuum Cleaner - Tangga Lipat - Gorden - Karpas - Penunjuk Waktu - White Board - Podium - Papan Nama Kantor - Papan Himbauan & Informasi - Dispenser - Brankas Besi	(29 Unit/Set/Paket) - 2 Unit - 1 Set - 1 Set - 4 Unit - 5 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Paket - 2 Paket - 2 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 3 Unit - 0 Unit	(2 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 1 Paket - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	100 %	-	(6 Unit/Set/Paket) - 1 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 1 Paket - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	20,69 %
1200209	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - Komputer (PC Desktop) - Notebook/Laptop - Printer - Scanner - Proyektor - Mesin Tik - Kamera - Monitor/Display - CCTV (3 Titik) - UPS/Stabilizer - Alat Penghancur Kertas - Alat Potong Kertas - Meter Dorong - Roll Meter - Jangka Sorong - Tabung Pemadam Kebakaran	(124 Unit/Paket) - 9 Unit - 31 Unit - 22 Unit - 5 Unit - 6 Unit - 1 Unit - 6 Unit - 1 Unit - 1 Paket - 13 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 8 Unit - 8 Unit - 8 Unit - 2 Unit	(14 Unit) - 1 Unit - 0 Unit - 2 Unit - 2 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 4 Unit - 4 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(25 Unit) - 1 Unit - 5 Unit - 16 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 2 Unit	(25 Unit) - 1 Unit - 5 Unit - 16 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 2 Unit	100 %	-	(39 Unit) - 2 Unit - 5 Unit - 18 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 4 Unit - 4 Unit - 0 Unit - 2 Unit	31,45 %
1200210	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan : - Meja Kerja - Meja Rapat - Kursi Kerja - Kursi Rapat - Kursi Tunggu - Sofa - Lemari Arsip - Rak Buku - Filling Kabinet	(189 Buah/Set) - 50 Buah - 14 Buah - 50 Buah - 40 Buah - 6 Buah - 1 Buah - 14 Buah - 7 Buah - 7 Buah	(20 Buah) - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 15 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah	(15 Buah) - 0 Buah - 12 Buah - 0 Buah - 3 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	(15 Buah) - 0 Buah - 12 Buah - 0 Buah - 3 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	100 %	-	(35 Buah) - 0 Buah - 12 Buah - 0 Buah - 18 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah	18,52 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	-	10 Paket	40,00 %
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	-	8 Paket	40,00 %
1 20 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	15 Paket	75 %	-	35 Paket	35,00 %
1 20 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	-	24 Paket	40,00 %
1 20 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeler Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	-	24 Paket	40,00 %
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	-	-	-	-	50 %	50 %
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	0 Paket	-	-	-	-	1 Paket	20,00 %
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	-	14 Dokumen	40,00 %
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	125 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	-	50 Dokumen	40,00 %
1 20 08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	32 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	-	13 Dokumen	40,63 %
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	-	2 Kegiatan	40,00 %
1 20 08 03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	4 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-	-	0 Kegiatan	0,00 %
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	95 %	42,42 %	65 %	53,03 %	81,58 %	-	53,03 %	55,82 %
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	100 %	71,21 %	95 %	46,97 %	49,44 %	-	46,97 %	46,97 %



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 70 – 80	49,45	> 50 - 60	24,08	48,16 %	-	24,08	32,11 %
					Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	90 %	35 %	60 %	5,13 %	8,55 %	-	5,13 %	5,70 %
					Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	435 OPD/PemDes	434 OPD/PemDes	400 OPD/PemDes	434 OPD/PemDes	109 %	-	437 OPD/PemDes	100,46 %
					Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	100 % 100 %	79,02 % 77,29 %	85 % 85 %	81,00 % 81,35 %	95,29 % 95,71 %	- -	81,00 % 81,35 %	81,00 % 81,35 %
					Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	100 %	95 %	100 %	105 %	-	100 %	100 %
					Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	95 %	95 %	91,67 %	96,49 %	-	93,00 %	93,00 %
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	-	8 Laporan Triwulan	40,00 %
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	-	8 Laporan Triwulan	40,00 %
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	-	8 Laporan Triwulan	40,00 %
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	-	8 Laporan Triwulan	40,00 %
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	-	8 Laporan Triwulan	40,00 %
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang terlaksana	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %	-	1 Kegiatan	16,67 %
1	20	20	14	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System & Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	8 Laporan (Per Semester)	0 Laporan Semester	2 Laporan Semester	0 Laporan Semester	0 %	-	0 Laporan Semester	0,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	90 %	48 %	60 %	58 %	96,67 %	-	58 %	64,39 %
1 20 21 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	108 Kegiatan	23 Kegiatan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	128%	-	34 Kegiatan	31,48 %
1 20 21 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	12 PKS	1 PKS	1 PKS	1 PKS	100 %	-	2 PKS	16,67 %
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 %	67 %	83 %	67 %	80,72 %	-	67 %	66,67 %
1 20 22 02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	-	2 Kegiatan	40,00 %

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENIS BELANJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 6.203.054.601,-	Rp. 6.072.349.085,-	97,89 %	Rp. 8.512.795.609,-	Rp. 8.342.672.382,-	98,00 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 3.365.790.000,-	Rp. 3.094.447.562,-	91,94 %	Rp. 5.057.329.450,-	Rp. 4.394.599.386,-	86,90 %
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00 %	Rp. 16.300.000,-	Rp. 14.700.000,-	90,18 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.213.540.000,-	Rp. 2.945.497.562,-	91,66 %	Rp. 4.818.529.450,-	Rp. 4.157.399.386,-	86,28 %
- Belanja Modal	Rp. 152.250.000,-	Rp. 148.950.000,-	97,83 %	Rp. 222.500.000,-	Rp. 222.500.000,-	100 %
JUMLAH	Rp. 9.568.844.601,-	Rp. 9.166.796.647,-	95,80 %	Rp. 13.570.125.059,-	Rp. 12.737.271.768,-	93,86 %

Sumber Data : Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan Tahun 2020



Tabel 1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2021 (Mengacu ke Renstra Perubahan)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
									Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2021 (s.d. Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6					Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	95 %	80 %	-	-	-	85 %	60 %	63 %
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	90 %	-	-	-	95 %	44 %	44 %
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	15 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2 Dokumen	13 %
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	24 Dokumen	-	-	-	-	8 Dokumen	5 Dokumen	21 %
						Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	2 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100 %	90 %	-	-	-	95 %	45 %	45 %
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	78 Bulan	-	-	-	-	26 Bulan	10 Bulan	13 %
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	24 Bulan	-	-	-	-	-	0 Bulan	0 %
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33 %
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	74 Dokumen	-	-	-	-	24 Dokumen	12 Dokumen	16 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2021 (s.d. Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0 %	-	-	-	-	0 %	0 %
6 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0 %
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0 %
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	100 %	90 %	-	-	-	95 %	95 %	95 %
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	290 Buah	-	-	-	-	85 Buah	85 Buah	29 %
6 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	33 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	0 %
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	177 Orang	-	-	-	-	62 Orang	4 Orang	2 %
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	6 PKS	-	-	-	-	2 PKS	0 PKS	0 %
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	90 %	-	-	-	95 %	46 %	46 %
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	12 Paket	-	-	-	-	4 Paket	2 Paket	17 %
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	36 Paket	-	-	-	-	12 Paket	6 Paket	17 %
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	12 Paket	-	-	-	-	4 Paket	2 Paket	17 %
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	36 Paket	-	-	-	-	12 Paket	6 Paket	17 %
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	36 Paket	-	-	-	-	12 Paket	6 Paket	17 %
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	36 Paket	-	-	-	-	12 Paket	6 Paket	17 %
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	240 Orang	-	-	-	-	-	0 Orang	0 %
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	165 Kegiatan	-	-	-	-	50 Kegiatan	45 Kegiatan	27 %
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan	3 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0 %
					Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	36 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	6 Bulan	8 %



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021			
									Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2021 (s.d. Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2		3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	80 %	50 %	-	-	-	60 %	40 %	50,00 %		
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan : - Mobil Pejabat Eselon II - Mobil Pejabat Eselon III	(6 Unit) - 1 Unit - 5 Unit	-	-	-	-	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit	0 %			
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan : - Mobil - Sepeda Motor	(6 Unit) - 1 Unit - 5 Unit	-	-	-	-	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit	0 %			
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan : - Meja Kerja - Kursi Kerja - Kursi Rapat - Kursi Tunggu - Kursi Tamu (Sofa) - Lemari Arsip - Filling Kabinet	(222 Buah/Set) - 98 Buah - 99 Buah - 10 Buah - 3 Buah - 2 Set - 8 Buah - 2 Buah	-	-	-	(3 Buah/Set) - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 1 Set - 2 Buah - 0 Buah	(0 Buah/Set) - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Set - 0 Buah - 0 Buah	0 %			
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - Komputer (PC Desktop) - Notebook/Laptop - Printer - Scanner - Kamera - Mesin Penghancur Kertas - TV - AC - Vacuum Cleaner - Papan Nama Kantor - Jaket Pengaman (Pelampung) - Penunjuk Waktu Digital	(109 Unit/Buah) - 11 Unit - 64 Unit - 13 Unit - 4 Unit - 1 Unit - 3 Unit - 1 Unit - 4 Unit - 1 Unit - 1 Buah - 5 Buah - 1 Unit	-	-	-	(67 Unit/Buah) - 3 Unit - 50 Unit - 2 Unit - 4 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Buah - 0 Buah - 5 Buah - 0 Unit	(0 Unit/Buah) - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Unit	0 %			
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - Jaringan CCTV - Jaringan Kabel Internet (LAN)	(2 Set) - 1 Set - 1 Set	-	-	-	-	(0 Set) - 0 Set - 0 Set	0 %			
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-	100 %	50 %	50,00 %		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	108 Paket	-	-	-	-	36 Paket	18 Paket	17 %		
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	36 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	6 Bulan	17 %		



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
									Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2021 (s.d. Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	85%	50 %	-	-	-	65 %	60 %	71,00 %
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	8 Paket	-	-	-	-	-	0 Paket	0,00 %
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	-	-	-	-	4 Paket	2 Paket	17 %
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	205 Buah/Set	-	-	-	-	40 Buah/Set	0 Buah/Set	0 %
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	237 Unit/Set	-	-	-	-	50 Unit/Set	10 Unit/Set	4 %
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	7 Paket	-	-	-	-	1 Paket	0 Paket	0 %
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	9 Paket	-	-	-	-	3 Paket	1 Paket	11 %
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	95 %	81 %	-	-	-	85 %	81 %	86 %
						Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	99 %	95 %	-	-	-	97 %	66 %	66 %
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	95%	85 %	-	-	-	85 %	31 %	33 %
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	1038 Laporan	-	-	-	-	392 Laporan	50 Laporan	5 %
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	516 Laporan	-	-	-	-	169 Laporan	23 Laporan	4 %
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	6 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	33 %
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	3 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	33 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan (Output)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
											Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2021 (s.d. Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3			4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT			433 Laporan	-	-	-	-	144 Laporan	144 Laporan	33 %
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal					Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana			4 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik			12 Laporan (Triwulan)	-	-	-	-	4 Laporan (Triwulan)	2 Laporan (Triwulan)	17 %
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)			95%	85 %	-	-	-	85 %	36 %	38 %
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			4 Laporan (Semester)	-	-	-	-	-	0 Laporan (Semester)	0 %
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP			12 Laporan (Triwulan)	-	-	-	-	4 Laporan (Triwulan)	2 Laporan (Triwulan)	17 %
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan - (Total 6 Elemen)			100 %	67 %	-	-	-	83 %	0 %	0 %
						Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah			95 %	75 %	-	-	-	80 %	60 %	63 %
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)			100 %	67 %	-	-	-	80 %	0 %	0 %
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap			24 KPA	-	-	-	-	20 KPA	0 KPA	0 %
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi					Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)			95%	80 %	-	-	-	85 %	12 %	12 %
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT			30 Laporan	-	-	-	-	8 Laporan	0 Laporan	0 %
6 01 02 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT			8 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	4 Laporan	50 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Initial Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2021 (s.d. Juni)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6 01 02 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	0 Laporan	0 %
6 01 02 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	11 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	0 Laporan	0 %

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan Tahun 2021 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENIS BELANJA	TAHUN 2021 (Triwulan 2)		
	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	Rp. 14.487.230.000,-	Rp. 5.534.126.476,-	38,20 %
- Belanja Pegawai	Rp. 9.021.084.402,-	Rp. 4.087.978.700,-	45,32 %
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.466.145.598,-	Rp. 1.446.147.776,-	26,46 %
BELANJA MODAL	Rp. 512.770.000,-	Rp. 0,-	0,00 %
JUMLAH	Rp. 15.000.000.000,-	Rp. 5.534.126.476,-	36,89 %

Sumber Data : Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 (Triwulan 2-Januari s/d Juni 2021)

Sebagai penjelasan tambahan terkait tabel tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode tahun 2018-2023, dimulai dari tahun 2020 sebagai baseline data evaluasi capaian kinerja tiga tahun selanjutnya. Baseline data yang bisa disajikan hanya terkait dengan Indikator Program dan Kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indikator kinerja sesuai Renstra Perubahan Periode tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indikator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2020 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode Tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2021.



Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (*outcome*), kegiatan (*initial outcome*) dan sub kegiatan (*output*) hingga triwulan 2 tahun 2021, yang tersaji pada tabel 1.2 di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 5 indikator program, 11 indikator kegiatan, dan 43 indikator sub kegiatan pada 3 program, 11 kegiatan, dan 41 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari 43 indikator kinerja sub kegiatan (*output*), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 38,77%, dengan rincian sebagai berikut :

- 6 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 21 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 15 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 11 indikator kinerja kegiatan (*initial outcome*), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 49,68%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 2 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 7 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 5 indikator kinerja program (*outcome*), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 61,69%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 3 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga triwulan ke-2 tahun 2021, baru mencapai 36,89% secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada.

Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.



Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian kinerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator program, masih terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2 untuk Renja 2021.

Khusus indikator kinerja prioritas pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dari 4 indikator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2 tahun 2021 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2021 adalah komitmen dan sinergitas seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, disamping ketersediaan anggaran yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara, beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, dipengaruhi oleh implementasi SAKIP dan SPIP yang belum memadai serta beban kerja dan wilayah kerja pengawasan yang begitu luas dengan waktu yang sangat padat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku APIP bila dibandingkan dengan ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM yang ada. Selain itu, komitmen jajaran OPD yang masih belum optimal dalam menindaklanjuti hasil-hasil temuan pemeriksaan APIP maupun aparat pengawasan eksternal.

Kondisi eksternal saat ini yang juga mempengaruhi tahapan pelaksanaan kegiatan adalah adanya pandemi covid-19 dengan berbagai upaya pembatasan aktivitas masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja.

- d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone), khususnya



program/kegiatan/sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :

- > Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip “*money follow program*” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kondisi pandemi wabah COVID-19;
- > Peningkatan kinerja organisasi yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan/sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan indikator sasaran prioritas/strategis yang akan dicapai dari 2 program strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu ;
 - *Program Penyelenggaraan Pengawasan,*
 - *Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;*
- > Penerapan manajemen kinerja (SAKIP) dan pengendalian internal (SPIP) serta penguatan Kapabilitas APIP secara terintegrasi dan berbasis IT dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis;
- > Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel serta Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengembangan kapasitas Aparatur Pengawasan serta penanganan pengaduan masyarakat;
- > Sosialisasi hasil pengawasan bagi OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone melalui kegiatan Asistensi/Pendampingan perlu diarahkan pada upaya mendorong komitmen jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan SAKIP, SPIP, dan Reformasi Birokrasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.



Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, sebagai unsur pengawasan internal pemerintahan daerah, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah sangatlah penting dan harus mampu mengawal dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk mendorong terwujudnya target-target kinerja pemerintahan daerah dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2018-2023.

Dengan mengacu pada RPJMD Perubahan Kab. Bone tahun 2018-2023, indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2023, dimana capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang sebelumnya dinyatakan dalam 8 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja menjadi 2 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja.

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023
(Sebelum Perubahan Renstra)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone pada Tahun 2018-2023
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan oleh Inspektorat Daerah secara online melalui Aplikasi Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat (dengan Level)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIPPemkab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023
	5. Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah OPD+ PemDes yang Bersih dari Temuan KKN dengan Jumlah Total OPD+PemDes) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap OPD dan PemDes, baik oleh APIP, BPK-RI dan APH pada Tahun 2018-2023
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian dengan Jumlah Laporan Kasus Kepegawaian) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli dengan Jumlah Kebutuhan Aparatur Pengawasan) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Kepegawaian dan Dokumen Analisis Kebutuhan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bone
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Persen (%)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023
(Setelah Perubahan Renstra)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
Tujuan` : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik & Akuntabel	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat (dengan Nilai)	Penjelasan Target : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB, pada Tahun 2018-2023
	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	Penjelasan Target : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumber Data : Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
	3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat (dengan Nilai)	Penjelasan Target : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemkab. Bone oleh BPKP, pada Tahun 2018-2023
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Berkelanjutan	1. Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	Persen (%)	Formulasi Penghitungan : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Persentase Perbandingan antara Jumlah OPD yang Predikat Implementasi SAKIPnya minimal B (>60) dengan Jumlah Total OPD Pemkab. Bone, berdasarkan Hasil Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab. Bone) Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP seluruh OPD Lingkup Pemkab. Bone setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
	2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen (%)	Formulasi Penghitungan : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Persentase Perbandingan antara Jumlah Rekomendasi Temuan yang telah selesai ditindak- lanjuti oleh OPD dengan Jumlah Total Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Keuangan & Kinerja Pemkab. Bone hingga tahun berkenaan/tahun pelaporan. Sumber Data : Laporan Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pemerintah Kab. Bone yang dirilis setiap tahunnya oleh BPK-RI, pada Tahun 2018-2023



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
	3. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan :</u> Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Persentase Perbandingan</i> antara <i>Jumlah OPD yang Menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)</i> dengan <i>Jumlah Total OPD Pemkab. Bone yang wajib dinilai/ dievaluasi</i> , berdasarkan Hasil Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab. Bone) <u>Sumber Data :</u> Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Maturitas SPIP (<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>) OPD Lingkup Pemkab. Bone yang wajib dinilai setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
	4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan :</u> Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Persentase Perbandingan</i> antara <i>Jumlah Laporan Hasil Penanganan/ Penyelesaian Pengaduan Masyarakat</i> dengan <i>Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima setiap tahunnya</i> sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone <u>Sumber Data :</u> Data Laporan Tahunan atas Realisasi Penanganan/ Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone atas penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	<u>Formulasi Penghitungan :</u> Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Hasil Penilaian (Assessment) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP</i> <u>Sumber Data :</u> Laporan Hasil Penilaian (<i>Assessment</i>) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP, pada Tahun 2018-2023

Sumber : Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

Perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selain itu, hal mendasar lainnya adalah tuntutan perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020 oleh KemenPAN-RB.

Terdapat indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja level kabupaten, tidak lagi menjadi indikator sasaran inspektorat, dikarenakan ruang lingkup indikator kinerja tersebut bersifat dampak akhir (ultimate impact), dan



beberapa indikator kinerja sasaran dinaikkan menjadi indikator tujuan perangkat daerah karena indikatornya bersifat final outcome (hasil akhir), sebagaimana tersaji pada tabel 2.2 di atas.

Setelah adanya perubahan Renstra Tahun 2018-2023, ketiga indikator tujuan dan kelima indikator kinerja sasaran strategis pada tabel 2.2, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dicapai untuk pelaksanaan renja tahun 2021 hingga 2023 (3 tahun tersisa dari periode Renstra). Pencapaian target kinerja dari IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan Renstra, merupakan gambaran pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2021 (Triwulan ke-2) sesuai Renstra Pokok dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, yang disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 dan 2022 (Sebelum Perubahan Renstra)

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
01	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	B (60,03)	B (63,43)	B (>60-70)	BB (>70-80)
<p>Catatan Analisis : Hasil evaluasi oleh KemenPAN-RB terhadap implementasi SAKIP PemKab. Bone yang terlaksana pada bulan Agustus-September 2020, tingkat akuntabilitas kinerja PemKab. Bone telah mencapai predikat B (Nilai 63,43). Pada tahun 2021, pelaksanaan validasi oleh KemenPAN-RB atas penilaian mandiri RB dijadwalkan terlaksana pada Triwulan III tahun 2021. Capaian kinerja indikator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2020, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Kab. Bone, yaitu predikat BB (>70-80).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP diseluruh tahapan kinerja. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan RPJMD dan Renstra OPD serta movev kinerja secara berkala baik di internal OPD maupun oleh APIP.</p> <p>Kedepannya, upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dimulai dari Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra PD sebagai acuan utama, akan ditindaklanjuti dengan implementasi IT berupa aplikasi online, yang dapat mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan pada akhir Periode RPJMD Perubahan 2018-2023.</p> <p>Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi dan asistensi/pendampingan implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.</p> <p>Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.</p>											
Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah											
02	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2021)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2021)
<p>(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</p>											
<p>Catatan Analisis : Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil audit BPK (yang diperoleh pada Bulan Mei 2020) terhadap LKPD Kab. Bone T.A. 2019, telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2021, pelaksanaan audit LKPD oleh BPKP telah terlaksana pada triwulan 2 tahun 2021, dan hasil audit diperoleh pada awal triwulan. Capaian kinerja indikator ini telah sesuai target Renja untuk tahun 2020, dan juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI, masih terdapat beberapa catatan kelemahan berupa temuan/rekomendasi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan masih diperlukan peningkatan kualitas LKPD Pemerintah Kab. Bone agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kedepannya, masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah disertai dengan pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan akuntabilitas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dengan kualitas yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui perencanaan pengawasan yang berbasis resiko.</p>											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah											
03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	C (36,72)	C (43,72)	B (>60-70)	B (>60-70)
Catatan Analisis : Nilai indeks reformasi birokrasi masih berada pada kategori predikat C (cukup) dengan nilai 43,72 berdasarkan Hasil penilaian terakhir pada tahun 2020 yang diperoleh pada awal tahun 2021. Sejalan dengan belum optimalnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal predikat BB (>70-80). Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 8 Area Perubahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi penilaian secara mandiri atas implementasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya hasilnya dilaporkan secara online kepada KemenPAN-RB, untuk memperoleh validasi akhir penilaiannya. Dan hal ini telah dilaksanakan sejak triwulan 1 hingga triwulan 2, dan menunggu hasil pelaksanaan validasi oleh KemenPAN-RB atas penilaian mandiri RB untuk tahun 2021, yang dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III tahun 2021.											
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN											
04	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 1 (Rintisan) Nilai 1,92	- <i>(Belum ada penilaian terbaru dari BPKP)</i>	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)
Catatan Analisis : Hingga tahun 2019, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone, masih berada pada Level 1 (rintisan) dengan nilai 1,92 berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh BPKP. Nilai ini menunjukkan masih rendahnya penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab. Bone. Sejalan dengan belum optimalnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal Level 3 (terdefinisi). Untuk tahun 2020, belum ada hasil penilaian terbaru oleh BPKP, yang telah terlaksana pada Triwulan III dan IV tahun 2020. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen pemerintahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan asistensi, monitoring dan evaluasi maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP PemKab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.											
05	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	-	-	85 %	90 %	95 %	98 %	99,77 %	99,77 %	96 %	98 %
Catatan Analisis : Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja ini berada pada persentase 99% dilihat dari total jumlah 438 OPD dan Pemerintah Desa yang meliputi 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone. Namun hal ini, lebih dipengaruhi oleh kasus-kasus terkait KKN, masih ada yang berproses di APH sehingga belum final status hukumnya. Pemerintah Desa merupakan instansi penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya masih ada dugaan temuan KKN yang material dan dilaporkan oleh masyarakat, bahkan, telah ada Kepala Desa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan penyalahgunaan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa oleh APH pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020, terdapat 1 kasus KKN yang telah diputuskan inkra oleh Pengadilan, yaitu Kasus Penyimpangan Dana PAUD pada Dinas Pendidikan. Sementara untuk data tahun 2021, masih dalam proses, dan hanya dapat diperoleh pada akhir tahun, setelah proses pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah terhadap OPD & PemDes terlaksana, yang akan disinkronisasikan datanya dengan hasil pemeriksaan oleh APH. Selain itu, Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD dan terutama Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, tetap menjadi prioritas pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah agar penyimpangannya dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Regulasi terkait pengawasan dana desa ini terus mengalami dinamika, dan hal ini menjadi tantangan bagi aparat pengawasan Inspektorat Daerah untuk terus dikembangkan kompetensinya dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintah desa.											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 5 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
06	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	95 %	95 %
Catatan Analisis : Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 95%, dimana telah tertangani 5 Kasus dari 5 Laporan pengaduan yang telah diterima hingga bulan Desember 2020. Untuk tahun 2021, proses penanganan pengaduan masyarakat masih terus berproses. Jumlah yang tidak begitu banyak dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima, lebih disebabkan oleh karena belum terintegritasnya proses pelaporan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Daerah untuk ditangani sesuai kewenangan. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH (Kepolisian atau Kejaksaan) sebelum dilimpahkan ke Inspektorat. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.											
Sasaran 6 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
07	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	91,67 %	95 %	95 %
Catatan Analisis : Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 92%, melebihi target yang telah ditetapkan, dimana hanya tertangani 22 Kasus dari 24 Kasus Kepegawaian yang telah diterima hingga bulan Desember 2020 (termasuk kasus kepegawaian yang masih tersisa ditahun 2019). Penanganan Kasus Kepegawaian umumnya, lebih banyak terkait dengan permohonan izin perceraian dibandingkan dengan kasus pelanggaran disiplin PNS, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BKPSDM dan Tim Terpadu Kabupaten. Hambatan terbesar dalam penanganan kasus ini, adalah padatnya jadwal penugasan pengawasan internal yang sifatnya mandatory audit dan rutin dalam pelaksanaannya, sementara ketersediaan Aparat pengawasan masih terbatas untuk ini dibandingkan dengan tingginya kasus kepegawaian yang diterima oleh Inspektorat Daerah. Sehingga, penanganan terkait kasus kepegawaian ini seringkali tidak diprioritaskan. Namun hal ini, akan menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepannya, agar bisa lebih efektif dan efisien penanganannya.											
Sasaran 7 : Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda											
08	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	-	-	50 %	60 %	70 %	80 %	43 %	58 %	55 %	65 %
Catatan Analisis : Capaian kinerja untuk sasaran strategis ini belum mencapai target indikator kinerja (60%) yang telah ditetapkan hingga Tahun 2020, dimana jumlah total Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan baru mencapai 58% atau 51 orang (Auditor 33 orang, P2UPD 15 orang, dan Audiwan 3 Orang) dari total jumlah 88 orang (Auditor 55 orang, P2UPD 28 orang, dan Audiwan 5 Orang) yang jadi Kebutuhan Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisis kebutuhan SDM yang tertuang dalam Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Dan terhadap target akhir dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023, tingkat capaian kinerja ini masih cukup jauh dari target 90%. Kompetensi dari aparat pengawasan yang ada juga masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya kompetensi teknis yang dibutuhkan terkait dengan jenis pengawasan tertentu yang menjadi mandatory audit Inspektorat Daerah selaku APIP. Mengingat masih adanya kesenjangan dan terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka ke depannya sangat diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. Disamping itu, juga diklat penjenjangan/pengembangan profesi atau kompetensi, juga dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri untuk peningkatan kualitas/kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi bagi Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah kab. Bone.											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 8 : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
09	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated)	-	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	- (Belum ada penilaian terbaru dari BPKP)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)
Catatan Analisis : Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan terakhir oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP inspektorat Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional. Untuk tahun 2019 dan 2020, belum ada hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinis Sul-Sel. Namun demikian, sejauh hasil penilaian tersebut ini masih perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus menerus, disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir tahun 2021 ini. Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah. Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.											

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan Tahun 2020



Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 dan 2023 (Setelah Perubahan Renstra)

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Berkelanjutan											
01	Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	-	-	65 %	75 %	85 %	95 %	53,03 %	Data Hasil Evaluasi Sakip OPD masih berproses	100 %	100 %
<p>Catatan Analisis : Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada OPD lingkup PemKab. Bone, diperoleh nilai persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) sebesar 53,03 %, yaitu 34 Badan/Dinas dan 1 Kecamatan. Untuk tahun 2021, masih menunggu rekapitulasi Hasil Evaluasi Sakip OPD, yang telah dilaksanakan pada Triwulan 2 Tahun 2021.</p> <p>Capaian kinerja indikator ini belum memenuhi target kinerja tahun 2020. Secara umum, Nilai akuntabilitasnya masih tergolong cukup rendah dari standar nilai tertinggi untuk kategori Nilai SAKIP yaitu AA (sangat memuaskan), dan harus dioptimalkan untuk mendorong pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah dan RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 terkait Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tingkat Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80), dimana diharapkan kedepannya semua OPD telah mencapai Predikat SAKIP minimal BB (>70-80).</p> <p>Keberhasilan pencapaian ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan optimalisasi proses implementasi SAKIP diseluruh tahapan kinerja. Dan kelemahan yang ada telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP yang lebih baik melalui monev kinerja secara berkala baik di internal OPD maupun oleh APIP.</p> <p>Kedepannya, upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP yang telah dimulai dari perbaikan RPJMD dan Renstra PD sebagai acuan utama melalui proses perubahan yang sudah dilakukan tahun 2021, dan akan ditindaklanjuti dengan implementasi IT berupa aplikasi online, yang dapat mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan pada akhir Periode RPJMD 2018-2023.</p> <p>Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.</p> <p>Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.</p>											
02	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	-	-	85 %	85 %	90 %	95 %	81 %	Belum ada hasil pemutakhiran data terbaru dari BPK	90 %	95 %
<p>Catatan Analisis : Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil pemutakhiran data pada bulan Desember 2020, tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan BPK-RI telah mencapai persentase 81% atau sebanyak 648 yang terselesaikan dari total 800 rekomendasi temuan. Capaian kinerja indikator ini belum mencapai target Renja untuk tahun 2020 sebesar 85%, dan juga masih cukup jauh dari target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023 sebesar 95%. Untuk data tahun 2021, masih dalam proses pemutakhiran oleh BPK, dan konsolidasi data terkait pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan hingga 2021, dijadwalkan pada triwulan 3 dan 4 tahun berjalan.</p> <p>Kondisi capaian indikator kinerja tersebut diatas banyak dipengaruhi oleh komitmen setiap Pimpinan OPD dan Pemerintah Desa yang belum optimal dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, tingkat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan penerapan SPIP yang masih lemah, sehingga masih terdapat temuan berulang yang perlu diminimalisir agar tidak menjadi temuan pemeriksaan BPK pada tahun-tahun selanjutnya.</p> <p>Kedepannya, diperlukan optimalisasi kinerja Tim Tindak Lanjut Kabupaten dalam mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI do setiap OPD dan Pemerintah Desa. Selain itu, pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap OPD dan Pemerintah Desa, untuk mendorong tingkat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah agar tidak terjadi temuan berulang, sehingga dapat mempertahankan akuntabilitas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dengan peningkatan kualitas yang lebih baik pada tahun -tahun berikutnya.</p> <p>Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui perencanaan program kerja pengawasan tahunan yang berbasis resiko.</p>											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	-	-	60% (target masih mengacu ke Renstra Pokok)	25 %	50 %	75 %	5,13 %	Belum ada hasil pemutakhiran data terbaru dari BPK	45 %	65 %
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2020, berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Daerah terhadap implementasi SPIP pada 39 OPD (Tidak termasuk Kecamatan) lingkup Kab. Bone, persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) masih sangat rendah yaitu 5,13% (hanya 2 OPD dari 39 OPD). Capaian kinerja ini masih sangat jauh dari target kinerja yang ditetapkan, baik terhadap target tahun 2020 sebesar 60% (Sesuai Renstra Pokok) maupun terhadap target akhir jangka menengah sebesar 75% (sesuai Renstra Perubahan) . Hal ini sejalan dengan masih sangat rendahnya Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2020 yang masih berada level 1 (Nilai 1,92). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh Pemahaman yang masih sangat lemah terkait SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen pemerintahan, menjadi kunci utama untuk meningkatkan capaian kinerja ini. Untuk tahun 2021, Penilaian maturitas SPIP oleh Inspektorat Daerah selaku APIP dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III atau IV tahun 2020, dan sudah harus menggunakan konsep <i>New Maturity SPIP</i>. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, akan mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan asistensi/pendampingan serta monitoring dan evaluasi maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP PemKab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.</p>											
04	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP	-	-	95 %	97 %	98 %	99 %	100 %	Belum ada hasil pemutakhiran data terbaru dari BPK	98 %	99 %
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 95%, dimana telah tertangani 5 Kasus dari 5 Laporan pengaduan yang telah diterima hingga bulan Desember 2020. Untuk tahun 2021, proses penanganan pengaduan masyarakat masih terus berproses. Jumlah yang tidak begitu banyak dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima, lebih disebabkan oleh karena belum terintegritasnya proses pelaporan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Daerah untuk ditangani sesuai kewenangan. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH (Kepolisian atau Kejaksaan) sebelum dilimpahkan ke Inspektorat. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.</p>											
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
09	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated)	Level 3 (Integrated)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	- (Belum ada hasil penilaian dari BPKP)	- (Belum ada hasil penilaian dari BPKP)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)
<p>Catatan Analisis : Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP inspektorat Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional. Untuk tahun 2019, belum ada hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel, pada bulan Desember Tahun 2019. Namun demikian, hasil penilaian ini masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus menerus, disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir tahun 2020 ini. Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah. Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.</p>											

Sumber Data : Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, Laporan Kinerja Tahun 2020, Data Capaian Kinerja Tahun 2021 (s.d. Juni 2021) - Inspektorat Daerah Kab. Bone



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Dari hasil capaian kinerja ke 8 Indikator Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone (3 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran), dapat diketahui bahwa hingga triwulan 2 tahun 2021, masih terdapat indikator kinerja yang memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya sebagai bahan evaluasi perencanaan kinerja kedepannya. Indikator kinerja kunci yang masih sangat perlu dioptimalkan proses pencapaiannya adalah indikator tujuan “*Tingkat Maturitas SPIP*” yang sejalan indikator sasaran “*Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP*”. Realisasi capaian kinerja ini masih sangat jauh dari target minimal yang harus dicapai, sehingga kedepannya perlu menjadi perhatian khusus untuk langkah-langkah strategis pencapaiannya.

Terkait dengan hal tersebut, dari catatan analisis yang telah disajikan, maka yang perlu jadi fokus perhatian kedepannya sebagai isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan peran Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
 - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
 - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah secara berkelanjutan;
 - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
 - Penguatan Kapabilitas APIP.



2. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
3. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian, dan sebagainya) sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas serta kompetensi tim yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
4. Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
5. Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis (termasuk kondisi wabah COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini), kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;



2. Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian, dan sebagainya) juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dan sinergitas yang lebih baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) secara penuh sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
5. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone, tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi dan juga menjadi perhatian kedepannya, antara lain :

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pengawasan, khususnya penerapan kendali mutu pengawasan;
2. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;



3. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat) dan alat ukur pemeriksaan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.



Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2022 – Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	90 %	15.532.753.119	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	90 %	13.324.203.900	Program Pendukung
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	61.367.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	45.783.000	Merupakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja rutin tahunan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	34.456.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	34.456.750	Meliputi Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, PKPT beserta perubahannya
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.265.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.265.000	Waktu Penyusunan sesuai tahapan penganggaran
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.680.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.680.000	Waktu Penyusunan sesuai tahapan penganggaran
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.942.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.942.500	Waktu Penyusunan sesuai tahapan penganggaran
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	21.023.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 Dokumen	5.438.750	Meliputi Dokumen LKJ, Data LPPD/LKPJ, Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Evaluasi Renja Per Triwulan
		Sesuai Lokasi Kegiatan Pameran	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	1 Kegiatan			Sesuai Lokasi Kegiatan Pameran	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	-		Diperkirakan kegiatan seperti ini tidak terselenggara karena adanya Pandemi Covid-19
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100 %	10.879.728.171	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100 %	9.660.845.962	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Keuangan bagi pelaksanaan Program/Kegiatan OPD
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	85 Orang/Bulan	10.759.544.421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	26 Bulan	9.540.662.212	Akumulasi dari seluruh Pembayaran Bulanan atas Hak ASN yang meliputi Gaji & Tunjangan, TPP dan Iuran Asuransi
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	7 Orang/Bulan	110.940.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	110.940.000	Aktivitas rutin pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.255.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.255.000	Merupakan Dokumen Laporan Keuangan Tahun sebelumnya
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	7.988.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	7.988.750	Merupakan Dokumen Pelaporan Berkala dan bersifat rutin dalam 1 tahun penganggaran
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	38.602.500	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	38.602.500	Merupakan Pengelolaan Rutin Administrasi BMD Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	17.452.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	17.452.500	Meliputi Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	21.150.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	21.150.000	Aktivitas Rutin Penatausahaan BMD dan dilaporkan berkala
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	97 %	1.118.776.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	97 %	970.656.000	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Kepegawaian bagi Pegawai Inspektorat
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Buah	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	95 Buah	42.750.000	Berupa Pakaian Olahraga bagi Pegawai Inspektorat Daerah
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	16 Dokumen	17.760.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	16 Dokumen	17.760.000	Aktivitas Rutin Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	65 Orang	637.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	55 Orang	523.750.000	Disesuaikan dengan Kebutuhan Diklat sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	2 PKS	418.416.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	2 PKS	386.396.000	Disesuaikan dengan Kebutuhan Diklat Teknis Pengawasan bagi JF Pengawasan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 %	905.425.748	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97 %	822.819.568	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Umum Penunjang aktivitas organisasi
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	7.620.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	6.128.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan



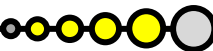
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	12 Paket	191.776.448	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	12 Paket	167.775.628	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	20.367.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	19.072.040	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	33.549.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	25.028.400	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	37.582.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	33.200.500	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	36.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	26.100.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	48 Orang	60.420.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	120 Orang	41.100.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan (12 orang per bulan)
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	55 Kegiatan	492.060.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	55 Kegiatan	482.015.000	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
9.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan	1 Aplikasi	25.900.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan	1 Aplikasi	22.400.000	Aplikasi yang terkait aktivitas utama OPD
			Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Orang/Bulan				Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	12 Bulan		Berupa Updating dan Maintenance Konten Website OPD
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	80 %	1.948.852.370	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	70 %	1.247.017.750	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan BMD yang bersifat prioritas
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	1 Unit : 1 Unit Mobil	513.850.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	1 Unit : 1 Unit Mobil	513.850.000	Berupa Mobil Dinas bagi Inspektur Daerah untuk pengganti mobil lama yang kondisinya sudah kurang memadai
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	4 Unit : - 1 Unit Mobil - 3 Unit Sepeda Motor	543.830.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	2 Unit : 3 Unit Sepeda Motor	50.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional kantor dan pengawasan lapangan
3.	Pengadaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan	184 Buah : - 91 Bh Meja Kerja - 92 Bh Kursi Kerja - 1 Bh Filling Kabinet	664.057.900	Pengadaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan	154 Buah : - 76 Bh Meja Kerja - 77 Bh Kursi Kerja - 1 Bh Filling Kabinet	584.979.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mebeler kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	<u>31 Unit/Buah</u> : - 6 Unit Laptop - 9 Unit Printer - 6 Unit Penghancur Kertas - 1 Unit Speaker Portabel - 8 Unit AC - 1 Unit Conference Camera	202.713.720	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	<u>12 Unit/Buah</u> : - 1 Unit Laptop - 7 Unit Printer - 4 Unit AC	73.788.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor yang masih kurang dan pengganti yang rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	<u>1 Set</u> : - 1 Set Peralatan/ perlengkapan CCTV	24.400.750	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	<u>1 Set</u> : - 1 Set Peralatan/ perlengkapan CCTV	24.400.750	Untuk fasilitas keamanan kantor dan kebutuhan monitoring aktivitas internal kantor bagi pimpinan
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	167.286.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	167.286.000	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	36 Paket	48.420.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	36 Paket	48.420.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	15 Orang/Bulan	118.866.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	118.866.000	Meliputi Jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan supir kendaraan dinas
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	85 %	412.713.930	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	75 %	371.193.120	Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan BMD secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun	2 Unit	63.942.290	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	61.178.550	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan per triwulan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun	21 Unit	70.204.140	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	49.777.070	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan per triwulan
3.	Pemeliharaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	43 Buah/Set	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	75 Buah	6.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan mebel kantor sesuai rencana kebutuhan



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	121 Unit	67.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	87 Unit	49.570.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	189.667.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	189.667.500	Berupa paket pekerjaan pemeliharaan/perbaikan interior ruangan gedung kantor
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	15.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya untuk pemeliharaan jaringan listrik, internet dan air bersih gedung kantor sesuai rencana kebutuhan
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 % 90 %	3.455.971.250	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Wilayah Kab. Bone (Pada Seluruh OPD & PemDes, Sesuai Tujuan Pengawasan)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	90 % 98 %	3.011.889.000	Program Prioritas
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	90 %	2.774.239.250	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Wilayah Kab. Bone	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	90 %	2.506.290.000	Berdasarkan kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis pengawasan yang tertuang dalam PKPT
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	395 Laporan	1.423.403.750	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	321 Laporan	1.227.455.000	Dilaksanakan sesuai Jenis Pengawasan Kinerja dalam PKPT
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	175 Laporan	500.504.750	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	172 Laporan	466.189.250	Dilaksanakan sesuai Jenis Pengawasan Keuangan dalam PKPT
3.	Reviu Laporan Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	2 Laporan	27.847.500	Reviu Laporan Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	2 Laporan	18.992.500	Dilaksanakan sesuai Jenis Reviu Laporan Kinerja dalam PKPT
4.	Reviu Laporan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	1 Laporan	12.658.750	Reviu Laporan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	1 Laporan	10.958.750	Dilaksanakan sesuai Jenis Reviu Laporan Keuangan dalam PKPT
5.	Pengawasan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	145 Laporan	416.977.000	Pengawasan Desa	Tersebar di 24 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	144 Laporan	416.977.000	Dilaksanakan sesuai Jenis Pengawasan Desa dalam PKPT



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Kerjasama Pengawasan Internal	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana	2 Kegiatan	118.287.500	Kerjasama Pengawasan Internal	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana	1 Kegiatan	118.287.500	Kegiatan Gelar Pengawasan Tk. Kabupaten, kerja sama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksaaan dan Kepolisian)
7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	274.560.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	247.430.000	Dilaksanakan secara berkala untuk mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	90 %	681.732.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Wilayah Kab. Bone	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	90 %	505.599.000	Merupakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan/penanganan laporan pengaduan masyarakat dan TPTGR yang tertuang dalam PKPT
1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan Semester	316.675.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan Semester	182.215.000	Berdasarkan hasil pengawasan internal yang terkait TPTGR
2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	4 Laporan Triwulan	365.057.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Wilayah Kab. Bone (Sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	4 Laporan Triwulan	323.384.000	Penanganan atas Laporan Pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya yang diterima atau ditugaskan oleh Bupati sesuai kewenangan
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan - (Total 6 Elemen)	100 %	612.255.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan - (Total 6 Elemen)	100 %	430.330.000	Program Prioritas
			Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	85 %			Wilayah Kab. Bone (Sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	85 %		
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)	100 %	73.630.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)	100 %	52.430.000	Merupakan kegiatan yang difokuskan pada Pemenuhan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	24 KPA	73.630.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	24 KPA	52.430.000	Berupa penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP serta pendampingan dari BPKP beserta proses Assessment.



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	90 %	538.625.000	Pendampingan dan Asistensi	Tersebar di 27 Kecamatan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	90 %	377.900.000	Merupakan kegiatan konsultasi dalam bentuk asistensi/pendampingan bagi OPD dan Pemdes terkait urusan pemerintahan yang tertuang dalam PKPT
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	10 Laporan	61.186.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	10 Laporan	54.386.000	Asistensi/Pendampingan terkait hal-hal strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang masih kurang/lemah sesuai hasil pemeriksaan BPK/APIP
2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	3 Laporan	13.371.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	3 Laporan	13.371.000	Asistensi/Pendampingan terkait peningkatan /penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi, termasuk Penilaian Mandiri RB
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Laporan	428.216.500	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Laporan	280.616.500	Koordinasi dan Monitoring yang dilakukan dengan KPK dan APH terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	3 Laporan	35.851.500	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersebar di 27 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	4 Laporan	29.526.500	Asistensi/Pendampingan terkait Penegakan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah
TOTAL PAGU INDIKATIF					19.600.979.369	TOTAL PAGU INDIKATIF					16.766.422.900

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah dalam rancangan awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021, tidak mengalami perubahan ataupun penyesuaian, baik dari segi jumlah, indikator dan target kinerja, serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, Time Bound) dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Catatan penting yang perlu disajikan hanya terkait dengan penjelasan sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang dirumuskan.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kab. Bone merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, melalui urusan pembinaan dan pengawasan internal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kab. Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, hingga saat ini Inspektorat Daerah Kab. Bone belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para stakeholder eksternal tersebut untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Kab. Bone, tetap mengawal isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat biasanya dalam bentuk pengaduan masyarakat, dan umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Laporan pengaduan tersebut dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan selaku APIP berdasarkan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021, dengan tema RKP Tahun 2022 secara nasional, yaitu “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” di tengah masih mewabahnya pandemi COVID-19, dengan fokus pembangunan diarahkan pada *Pemulihan Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, dan Reformasi Sistem Kesehatan*, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. *Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4-6,0 %;*
2. *Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24-5,52 %;*
3. *Ratio Gini sebesar 0,376-0,378;*
4. *Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44-73,48;*
5. *Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8-27,1 %;*
6. *Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-105;*
7. *Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;*
8. *Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,0 %.*

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, target kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022, yaitu :

1. *Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,98-7,6 %;*
2. *Tingkat Kemiskinan sebesar 8,38-9,19 %;*
3. *Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,16-6,95 %.*

Sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2021 sesuai arahan Presiden, meliputi :

1. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung, dengan kerjasama industri dan talenta global;



2. *Pembangunan Infrastruktur;*

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. *Penyederhanaan Regulasi;*

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;

4. *Penyederhanaan Birokrasi;*

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. *Transformasi Ekonomi;*

Melakukan transformasi ekonomi dari ketertagtungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, dari 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional sebagaimana tersebut di atas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Daerah, tidak diatur secara khusus arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah secara nasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021. Namun pada prinsipnya, Inspektorat Daerah selaku APIP, memiliki peran penting sekaligus kewajiban untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik



dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional, khususnya yang terkait dengan Agenda ke-7 dengan Program Prioritas **“Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola”** dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agenda dan program prioritas pembangunan nasional tersebut sudah selaras dengan salah satu misi Pemerintah Kab. Bone yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN”**, dengan tujuan **“Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN”**. Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP menjadi salah satu Perangkat Daerah yang berperan utama dalam mendorong pencapaian Misi dan Tujuan RPJMD tersebut, dengan Program Prioritas **“Program Penyelenggaraan Pengawasan”** dan **“Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi”**.

Dalam PMDN Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, diatur beberapa hal strategis terkait penyelenggaran pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah akan dialokasikan penganggaran program dan kegiatannya, yang meliputi :

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan evaluasi pelayanan publik;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;



- 5) Kegiatan revidi DAK Fisik yang pendanaannya bersumber dari 5% (lima perseratus) alokasi dana kegiatan penunjang DAK Fisik, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, yang bukan berupa honorarium perevidi;
- 6) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah agar lebih optimal dan secara konsisten dapat tercapai dengan lebih baik serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa;
- 7) Peningkatan kapabilitas APIP secara penuh sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) secara penuh di tahun 2022, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan;
- 8) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengembalian nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi prioritas program penyelenggaraan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah, dan juga disinkronisasikan dengan pencapaian target kinerja outcome/output program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

**Masyarakat Bone Yang MaBeSSa
(Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)**



Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun ***Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2022*** yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

Akselerasi Ekonomi Serta Penguatan Kapasitas Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2022, yaitu ***“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”***, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2022.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022, yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel.*

Dengan **Sasaran** :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan;*
2. *Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;*

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2022, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2022	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	
		2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
		3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	
	1. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	95 %	85 %	➤ PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan InternalKegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu <i>Terdiri dari 9 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i> ➤ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pendampingan dan Asistensi <i>Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i>
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	95 %	90 %	
		3. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	75 %	50 %	
		4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP	99 %	98 %	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2022	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Penuh	Level 3 (Integrated) Penuh	<p>➤ PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YELENGGARAAN PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan <p><i>Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p> <p>➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahKegiatan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahKegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat DaerahKegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahKegiatan Administrasi Umum Perangkat DaerahKegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p><i>Terdiri dari 37 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada Bab IV</i></p>



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah dalam rentang periode lima tahun (Renstra) berjalan (Tahun 2018-2023), maka pada tahun 2018-2021 telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,3-0,6 % dari total belanja APBD Kab. Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.
Alokasi Anggaran Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2021 dan Proyeksi Tahun 2022

TAHUN	PAGU ANGGARAN			PROSENTASE terhadap Total Belanja APBD
	BEL. TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
2018	Rp. 4.418.991.531,-	Rp. 3.250.000.000,-	Rp. 7.668.991.531,-	0,3 %
2019	Rp. 6.018.959.801,-	Rp. 3.115.790.000,-	Rp. 9.134.749.801,-	0,3 %
2020	Rp. 8.228.065.251,-	Rp. 6.772.025.250,-	Rp. 15.000.090.501,-	0,6 %
TAHUN	PAGU ANGGARAN			PROSENTASE terhadap Total Belanja APBD
	BELANJA OPERASI (Belanja Pegawai & Barang/Jasa)	BELANJA MODAL (Belanja Peralatan & Mesin)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
2021	Rp. 14.487.230.000,-	Rp. 512.770.000,-	Rp. 15.000.000.000,-	± 0,52 %
2022	Rp. 15.519.405.150,-	Rp. 1.247.017.750,-	Rp. 16.766.422.900,-	± 0,56 %

Sumber Data : DPA/DPPA-SKPD T.A. 2018-2021 dan Pra-RKA Renja T.A. 2022 - Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Nilai Pagu Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif yang diperoleh dari analisis kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk proyeksi penganggaran dalam RKPD T.A. 2022, dengan mengacu pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023. Nilai pagu indikatif ini diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan prinsip “*Money Follow Program*” sesuai beban dan wilayah kerja pengawasan. Proyeksi anggaran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai.

Dari tabel tersebut di atas, jelas tergambar bahwa persentase anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap APBD meningkat sangat signifikan hingga tahun 2021. Hal ini didorong oleh komitmen Pemerintah Kab. Bone untuk menjalankan amanah Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD dari tahun 2020 hingga 2021, yang menetapkan bahwa Persentase Anggaran untuk Inspektorat



Daerah selaku APIP minimal 0,5% dari Total Belanja Daerah dan lebih dari Rp. 15 Milyar untuk APBD Kabupaten/Kota diatas Rp. 2 Trilyun.

Olehnya itu, sejalan dengan prinsip “*Money Follow Program*” yang merupakan prinsip dasar dalam penganggaran, juga ditetapkan agar pemanfaatan nilai anggaran untuk Inspektorat Daerah ini diarahkan pada penguatan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan mengacu pada PMDN Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2022, yang meliputi :

- *Kegiatan Pengawasan, yaitu :*
 1. *Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA-SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;*
 2. *Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;*
 3. *Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;*
 4. *Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System.*
- *Kegiatan Non Pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan*
- *Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan, seperti laptop, alat ukur dan kendaraan operasional, dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.*



4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2022, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2022, direncanakan terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan yang terbagi atas 2 Program Prioritas (4 Kegiatan & 14 Sub Kegiatan) dan 5 Program Pendukung/Penunjang (8 Kegiatan & 37 Sub Kegiatan) yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada tabel 5 (hal. 52) di Bab III sebelumnya.

Kedua program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa, serta peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Sementara satu program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program, kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input yang



Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6					Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	90 %	Rp. 13.324.203.900	DAU-APBD	Program Pendukung	95 %	Rp. 16.702.500.00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 45.783.000	DAU-APBD	Merupakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja rutin tahunan	100 %	Rp. 79.500.000
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Dokumen	Rp. 34.456.750	DAU-APBD	Meliputi Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, PKPT beserta perubahannya	5 Dokumen	Rp. 40.000.000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp. 2.265.000	DAU-APBD	Waktu Penyusunan sesuai tahapan penganggaran	1 Dokumen	Rp. 2.500.000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp. 1.680.000	DAU-APBD	Waktu Penyusunan sesuai tahapan penganggaran	1 Dokumen	Rp. 2.000.000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp. 1.942.500	DAU-APBD	Waktu Penyusunan sesuai tahapan penganggaran	1 Dokumen	Rp. 2.000.000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	8 Dokumen	Rp. 5.438.750	DAU-APBD	Meliputi Dokumen LKJ, Data LPPD/LKPJ, Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Evaluasi Renja Per Triwulan	8 Dokumen	Rp. 33.000.000
						Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	Sesuai Lokasi Kegiatan Pameran	-			Diperkirakan kegiatan seperti ini tidak terselenggara karena adanya Pandemi Covid-19	1 Kegiatan	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 9.660.845.962	DAU-APBD	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Keuangan bagi pelaksanaan Program/Kegiatan OPD	100 %	Rp. 11.124.500.000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	26 Bulan	Rp. 9.540.662.212	DAU-APBD	Akumulasi dari seluruh Pembayaran Bulanan atas Hak ASN yang meliputi Gaji & Tunjangan, TPP dan Iuran Asuransi	26 Bulan	Rp. 11.000.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp. 110.940.000	DAU-APBD	Aktivitas rutin pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri	12 Bulan	Rp. 115.000.000
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	Rp. 1.255.000	DAU-APBD	Merupakan Dokumen Laporan Keuangan Tahun sebelumnya	1 Dokumen	Rp. 1.500.000
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	25 Dokumen	Rp. 7.988.750	DAU-APBD	Merupakan Dokumen Pelaporan Berkala dan bersifat rutin dalam 1 tahun penganggaran	25 Dokumen	Rp. 8.000.000
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 38.602.500	DAU-APBD	Merupakan Pengelolaan Rutin Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	Rp. 42.500.000
6 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	Rp. 17.452.500	DAU-APBD	Meliputi Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD	2 Dokumen	Rp. 20.000.000
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	6 Dokumen	Rp. 21.150.000	DAU-APBD	Aktivitas Rutin Penatausahaan BMD dan dilaporkan berkala	6 Dokumen	Rp. 22.500.000
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	97 %	Rp. 970.656.000	DAU-APBD	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Kepegawaian bagi Pegawai Inspektorat	100 %	Rp. 1.120.000.000
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	95 Buah	Rp. 42.750.000	DAU-APBD	Berupa Pakaian Olahraga bagi Pegawai Inspektorat Daerah	110 Buah	Rp. 50.000.000
6 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	16 Dokumen	Rp. 17.760.000	DAU-APBD	Aktivitas Rutin Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	Rp. 20.000.000
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	55 Orang	Rp. 523.750.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan Kebutuhan Diklat sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	60 Orang	Rp. 700.000.000
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	Kec. Tanete Riattang Barat	2 PKS	Rp. 386.396.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan Kebutuhan Diklat Teknis Pengawasan bagi JF Pengawasan	2 PKS	Rp. 350.000.000
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	97 %	Rp. 822.819.568	DAU-APBD	Merupakan Pelayanan Rutin Administrasi Umum Penunjang aktivitas organisasi	100 %	Rp. 943.500.000
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 6.128.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 7.500.000
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 167.775.628	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 19.072.040	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 25.000.000
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 25.028.400	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 50.000.000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 33.200.500	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 40.000.000
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 26.100.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 35.000.000
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	120 Orang	Rp. 41.100.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan (12 orang per bulan)	120 Orang	Rp. 50.000.000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	55 Kegiatan	Rp. 482.015.000	DAU-APBD	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	60 Kegiatan	Rp. 500.000.000
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Aplikasi	Rp. 22.400.000	DAU-APBD	Aplikasi yang terkait aktivitas utama OPD	1 Aplikasi	Rp. 36.000.000
		Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Bulan		DAU-APBD	Berupa Updating dan Maintenance Konten Website OPD	12 Bulan	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	70 %	Rp. 1.247.017.750	DAU-APBD	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan BMD yang bersifat prioritas	80 %	Rp. 2.650.000.000
6 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Unit : 1 Unit Mobil (Eselon II)	Rp. 513.850.000	DAU-APBD	Berupa Mobil Dinas bagi Inspektur Daerah untuk pengganti mobil lama yang kondisinya sudah kurang memadai	5 Unit : 5 Unit Mobil (Eselon III)	Rp. 1.500.000.000
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Unit : 3 Unit Sepeda Motor	Rp. 50.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional kantor dan pengawasan lapangan	4 Unit : ~ 1 Unit Mobil ~ 3 Unit Sepeda Motor	Rp. 575.000.000
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	154 Buah : ~ 76 Bh Meja Kerja ~ 77 Bh Kursi Kerja ~ 1 Bh Filling Kabinet	Rp. 584.979.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mebeler kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	63 Buah/Set : ~ 22 Bh Meja Kerja ~ 22 Bh Kursi Kerja ~ 10 Bh Kursi Rapat ~ 3 BhKursi Tunggu ~ 1 Set Kursi Sofa ~ 6 Bh Lemari Arsip ~ 1 Bh Filling Kabinet	Rp. 200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Unit/Buah : - 1 Unit Laptop - 7 Unit Printer - 4 Unit AC	Rp. 73.788.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor yang masih kurang dan pengganti yang rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan	30 Unit/Buah : - 8 Unit Komputer PC - 13 Unit Laptop - 4 Unit Printer - 2 Unit Penghancur Kertas - 1 Unit TV - 1 Unit Penunjuk Waktu Digital - 1 Buah Papan Nama Kantor	Rp. 300.000.000
6 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Set : 1 Set Peralatan/ perlengkapan CCTV	Rp. 24.400.750	DAU-APBD	Untuk fasilitas keamanan kantor dan kebutuhan monitoring aktivitas internal kantor bagi pimpinan	1 Set : 1 Set Peralatan/ perlengkapan Jaringan Kabel Internet (LAN)	Rp. 75.000.000
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 167.286.000	DAU-APBD	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 195.000.000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 48.420.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	36 Paket	Rp. 75.000.000
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp. 118.866.000	DAU-APBD	Meliputi Jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan supir kendaraan dinas	12 Bulan	Rp. 120.000.000
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kec. Tanete Riattang Barat	75 %	Rp. 371.193.120	DAU-APBD	Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan BMD secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan	85 %	Rp. 547.500.000
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 61.178.550	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 125.000.000
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 49.777.070	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 150.000.000
6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	75 Buah	Rp. 6.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan mebel kantor sesuai rencana kebutuhan	90 Buah/Set	Rp. 7.500.000
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	87 Unit	Rp. 49.570.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	100 Unit/Set	Rp. 55.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Paket	Rp. 189.667.500	DAU-APBD	Berupa paket pekerjaan pemeliharaan/perbaikan interior ruangan gedung kantor	3 Paket	Rp. 190.000.000
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Paket	Rp. 15.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya untuk pemeliharaan jaringan listrik, internet dan air bersih gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	Rp. 20.000.000
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	Wilayah Kab. Bone (Pada Seluruh OPD & PemDes, Sesuai Tujuan Pengawasan)	90 %	Rp. 3.011.889.000	DAU-APBD	Program Prioritas	95 %	Rp. 3.667.500.000
		Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah		98 %				99 %	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Wilayah Kab. Bone	90 %	Rp. 2.506.290.000	DAU-APBD	Berdasarkan kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis pengawasan yang tertuang dalam PKPT	95 %	Rp. 2.967.500.000
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Tersebar di 27 Kecamatan	321 Laporan	Rp. 1.227.455.000	DAU-APBD	Dilaksanakan sesuai Jenis Pengawasan Kinerja dalam PKPT	325 Laporan	Rp. 1.500.000.000
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Tersebar di 27 Kecamatan	172 Laporan	Rp. 466.189.250	DAU-APBD	Dilaksanakan sesuai Jenis Pengawasan Keuangan dalam PKPT	175 Laporan	Rp. 525.000.000
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan	Rp. 18.992.500	DAU-APBD	Dilaksanakan sesuai Jenis Reviu Laporan Kinerja dalam PKPT	2 Laporan	Rp. 25.000.000
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Laporan	Rp. 10.958.750	DAU-APBD	Dilaksanakan sesuai Jenis Reviu Laporan Keuangan dalam PKPT	1 Laporan	Rp. 17.500.000
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	Tersebar di 24 Kecamatan	144 Laporan	Rp. 416.977.000	DAU-APBD	Dilaksanakan sesuai Jenis Pengawasan Desa dalam PKPT	145 Laporan	Rp. 450.000.000
6 01 02 2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 118.287.500	DAU-APBD	Kegiatan Gelar Pengawasan Tk. Kabupaten, kerja sama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksaan dan Kepolisian)	2 Kegiatan	Rp. 200.000.000
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Movev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Tersebar di 27 Kecamatan	4 Laporan Triwulan	Rp. 247.430.000	DAU-APBD	Dilaksanakan secara berkala untuk mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan Triwulan	Rp. 250.000.000
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Wilayah Kab. Bone	90 %	Rp. 505.599.000	DAU-APBD	Merupakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan/ penanganan laporan pengaduan masyarakat dan TPTGR yang tertuang dalam PKPT	95 %	Rp. 700.000.000



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan Semester	Rp.	182.215.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pengawasan internal yang terkait TPTGR	2 Laporan Semester	Rp.	225.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Dalam Wilayah Kab. Bone (Sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)	4 Laporan Triwulan	Rp.	323.384.000	DAU-APBD	Penanganan atas Laporan Pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya yang diterima atau ditugaskan oleh Bupati sesuai kewenangan	4 Laporan Triwulan	Rp.	475.000.000
6	01	02			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan - (Total 6 Elemen)	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp.	430.330.000	DAU-APBD	Program Prioritas	100 %	Rp.	745.000.000
						Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Wilayah Kab. Bone (Sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)	85 %					95 %		
6	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp.	52.430.000	DAU-APBD	Merupakan kegiatan yang difokuskan pada Pemenuhan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP	100 %	Rp.	65.000.000
6	01	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	Kec. Tanete Riattang Barat	24 KPA	Rp.	52.430.000	DAU-APBD	Berupa penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP serta pendampingan dari BPKP beserta proses Assessment.	24 KPA	Rp.	65.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Tersebar di 27 Kecamatan	90 %	Rp.	377.900.000	DAU-APBD	Merupakan kegiatan konsultasi dalam bentuk asistensi/pendampingan bagi OPD dan Pemdes terkait urusan pemerintahan yang tertuang dalam PKPT	95 %	Rp.	680.000.000
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Tersebar di 27 Kecamatan	10 Laporan	Rp.	54.386.000	DAU-APBD	Asistensi/Pendampingan terkait hal-hal strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang masih kurang/lemah sesuai hasil pemeriksaan BPK/APIP	12 Laporan	Rp.	100.000.000
6	01	02	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Tersebar di 27 Kecamatan	3 Laporan	Rp.	13.371.000	DAU-APBD	Asistensi/Pendampingan terkait peningkatan /penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi, termasuk Penilaian Mandiri RB	3 Laporan	Rp.	35.000.000
6	01	02	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersebar di 27 Kecamatan	8 Laporan	Rp.	280.616.500	DAU-APBD	Koordinasi dan Monitoring yang dilakukan dengan KPK dan APH terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Laporan	Rp.	500.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 01 02 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Tersebar di 27 Kecamatan	4 Laporan	Rp. 29.526.500	DAU-APBD	Asistensi/Pendampingan terkait Penegakan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	4 Laporan	Rp. 45.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA OPERASIONAL (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG & JASA)					Rp. 15.519.405.150				Rp. 18.465.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA MODAL (BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN)					Rp. 1.247.017.750				Rp. 2.650.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH					Rp. 16.766.422.900				Rp. 21.115.000.000

Dalam tabel 7 tersebut di atas, disajikan hal-hal yang menjadi catatan penting sebagai penjelasan atas sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2022.

Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat program/kegiatan Inspektorat Daerah ini merupakan bagian dari RKPD Tahun 2022 yang penyusunannya dilakukan secara simultan, dengan memperhatikan :

- ✓ Keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target kinerja outcome dan output yang ingin dicapai dengan dokumen perencanaan Renstra Perubahan dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023;
- ✓ Kualitas rumusan indikator kinerja outcome dan output berorientasi pada hasil dan harus memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART) demi terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ✓ Penetapan target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome/output program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disediakan oleh Kemendagri. Hasil penginputan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 2*.



BAB V P E N U T U P

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana kerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan berorientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kab. Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk pemerintahan desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2022 memuat 3 Program, 12 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 2 Program Prioritas (4 Kegiatan & 14 Sub Kegiatan) dan 5 Program Pendukung/Penunjang (8 Kegiatan & 37 Sub Kegiatan) yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja dari 5 tujuan dan 8 sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan, yaitu sebagai berikut :



- ✓ Penguatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
 - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
 - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
 - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
 - Penguatan Kapabilitas APIP;
- ✓ Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone;
- ✓ Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian, dan sebagainya) sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas serta kompetensi tim yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone;
- ✓ Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
- ✓ Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- ✓ Penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 ini perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip "*money follow program*", berdasarkan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis serta relevan dengan tugas



dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Termasuk strategi pelaksanaan program & kegiatan dalam mengantisipasi masih mewabahnya COVID-19.

Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyesuaian target kinerja tahunan dan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan analisa kebutuhannya serta hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan dan kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam proses pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis (termasuk antisipasi wabah COVID-19), kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
- ✓ Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system, kasus kepegawaian, dan sebagainya) juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dan sinergitas yang lebih baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ✓ Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;



- ✓ Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 ini, yang diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada tahun 2022, yaitu **”Akselerasi Ekonomi Serta Penguatan Kapasitas Sosial dan Kesehatan Masyarakat”**, sehingga tercipta **“Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**, ditengah-tengah tantangan Pandemi COVID-19 yang kedepannya semoga bisa segera dapat diatasi bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia dan seluruh dunia.



LAMPIRAN 1

**Cascading Kinerja Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone
Tahun 2022**

CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2022 - INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

LAMPIRAN 1

VISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)
MISI - RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
TUJUAN & SASARAN RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Tujuan : Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN
	Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi = B (>60 - 70)
	Sasaran : Berkurangnya kasus KKN
	Indikator Kinerja : Proporsi OPD yang bebas dari KKN = 95 %

TUJUAN RENSTRA	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel	
INDIKATOR TUJUAN	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP = BB (>70 - 80) 2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) = WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) = Level 3 (3 ≤ Nilai < 4)	
	Rp16.766.422.900	
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SASARAN	1. % OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP = 85% 2. % Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI = 90% 3. % OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP = 50% 4. % Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PemDa dan PemDes sesuai kewenangan APIP = 98%	5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) = Level 3 (Integrated) Penuh
ANGGARAN	Rp3.389.789.000	Rp13.376.633.900
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	INSPEKTUR DAERAH	

PROGRAM		Program Penyelenggaraan Pengawasan		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja & Keuangan OPD dan PemDes dari potensi /timbulnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Meningkatnya Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3	Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah		
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM	% Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	% Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	% OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	% Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	% Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah		
	Target Kinerja = 90%	Target Kinerja = 98%	Target Kinerja = 85%	Target Kinerja = 100%	Target Kinerja = 90%		
ANGGARAN	Rp2.506.290.000	Rp505.599.000	Rp377.900.000	Rp52.430.000	Rp13.324.203.900		
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan & Investigasi	Irbn Bidang Pencegahan & Investigasi - Irbn Wil. I s.d. IV		SEKRETARIS		
		SEKRETARIS					

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT	Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Infrastruktur Key Process Area (KPA) Kapabilitas APIP Level 3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terciptanya ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	% Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	% Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT	% Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT	% Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	% Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik
	Target Kinerja = 90%	Target Kinerja = 90%	Target Kinerja = 90%	Target Kinerja = 100%	Target Kinerja = 100%	Target Kinerja = 100%	Target Kinerja = 100%	Target Kinerja = 97%	Target Kinerja = 97%	Target Kinerja = 70%	Target Kinerja = 100%	Target Kinerja = 75%
ANGGARAN	Rp2.506.290.000	Rp505.599.000	Rp377.900.000	Rp52.430.000	Rp45.783.000	Rp9.660.845.962	Rp38.602.500	Rp970.656.000	Rp822.819.568	Rp1.247.017.750	Rp167.286.000	Rp371.193.120
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan & Investigasi	Irbn Bidang Pencegahan & Investigasi - Irbn Wil. I s.d. IV	SEKRETARIS								

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SASARAN SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Tersedianya Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Terpenuhinya kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan pada Key Process Area (KPA) Kapabilitas APIP Level 3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
ANGGARAN	Target Kinerja = 321 Laporan Rp1.227.455.000	Target Kinerja = 2 Laporan Semester Rp182.215.000	Target Kinerja = 10 Laporan Rp54.386.000	Target Kinerja = 24 KPA Rp52.430.000	Target Kinerja = 5 Dokumen Rp34.456.750	Target Kinerja = 6 Bulan Rp9.540.662.212	Target Kinerja = 2 Dokumen Rp17.452.500	Target Kinerja = 95 Buah Rp42.750.000	Target Kinerja = 4 Paket Rp6.128.000	Target Kinerja = 1 Unit Mobil Rp513.850.000	Target Kinerja = 36 Paket Rp48.420.000	Target Kinerja = 4 Paket Rp61.178.550
SUB KEGIATAN 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Tersedianya Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Terealisasinya Pembayaran Jasa / Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Terealisasinya Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa / Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
ANGGARAN	Target Kinerja = 172 Laporan Rp466.189.250	Target Kinerja = 4 Laporan Triwulan Rp323.384.000	Target Kinerja = 3 Laporan Rp13.371.000	Target Kinerja = 3 Laporan Rp13.371.000	Target Kinerja = 1 Dokumen Rp2.265.000	Target Kinerja = 12 Bulan Rp110.940.000	Target Kinerja = 6 Dokumen Rp21.150.000	Target Kinerja = 16 Dokumen Rp17.760.000	Target Kinerja = 12 Paket Rp167.775.628	Target Kinerja = 2 Unit Motor Rp50.000.000	Target Kinerja = 12 Bulan Rp118.866.000	Target Kinerja = 4 Paket Rp49.777.070
SUB KEGIATAN 3	Reviu Laporan Kinerja		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Mebel		Pemeliharaan Mebel
SASARAN SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT		Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah		Terlaksananya Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksananya Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
ANGGARAN	Target Kinerja = 2 Laporan Rp18.992.500		Target Kinerja = 8 Laporan Rp280.616.500	Target Kinerja = 8 Laporan Rp280.616.500	Target Kinerja = 1 Dokumen Rp1.680.000	Target Kinerja = 1 Dokumen Rp1.255.000		Target Kinerja = 55 Orang Rp523.750.000	Target Kinerja = 4 Paket Rp19.072.040	Target Kinerja = 154 Buah Rp584.979.000		Target Kinerja = 75 Buah Rp6.000.000
SUB KEGIATAN 4	Reviu Laporan Keuangan		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 4	Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT		Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah		Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait Teknis Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 4	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT		Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai kebutuhan per triwulan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
ANGGARAN	Target Kinerja = 1 Laporan Rp10.958.750		Target Kinerja = 4 Laporan Rp29.526.500	Target Kinerja = 4 Laporan Rp29.526.500	Target Kinerja = 1 Dokumen Rp1.942.500	Target Kinerja = 25 Dokumen Rp7.988.750		Target Kinerja = 2 PKS Rp386.396.000	Target Kinerja = 12 Paket Rp25.028.400	Target Kinerja = 12 Unit/Buah Rp73.788.000		Target Kinerja = 87 Unit Rp49.570.000
SUB KEGIATAN 5	Pengawasan Desa				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 5	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT				Terlaksananya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Evaluasi & Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksananya Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT				Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
ANGGARAN	Target Kinerja = 144 Laporan Rp416.977.000				Target Kinerja = 8 Dokumen Rp5.438.750			Target Kinerja = 12 Paket Rp33.200.500	Target Kinerja = 12 Paket Rp33.200.500	Target Kinerja = 1 Set Rp24.400.750		Target Kinerja = 3 Paket Rp189.667.500

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN 6	Kerjasama Pengawasan Internal								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 6	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 6	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana								Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan			Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
ANGGARAN	Target Kinerja = 1 Kegiatan Rp118.287.500								Target Kinerja = 12 Paket Rp26.100.000			Target Kinerja = 3 Paket Rp15.000.000
SUB KEGIATAN 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								Fasilitasi Kunjungan Tamu			
SASARAN SUB KEGIATAN 7	Tersedianya Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal								Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu			
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 7	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik								Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan			
ANGGARAN	Target Kinerja = 4 Laporan Triwulan Rp247.430.000								Target Kinerja = 120 Orang Rp41.100.000			
SUB KEGIATAN 8									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
SASARAN SUB KEGIATAN 8									Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 8									Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah			
ANGGARAN									Target Kinerja = 55 Kegiatan Rp482.015.000			
SUB KEGIATAN 9									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
SASARAN SUB KEGIATAN 9									Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah			
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN 9									Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan			
ANGGARAN									Target Kinerja = 1 Aplikasi Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah			
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag. Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut			Kasubag. Perencanaan		Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan						

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa	Laporan Pengaduan Masyarakat, Kasus Gratifikasi/ Whistle Blower/Benturan Kepentingan, serta Kasus Kepegawaian dan Kasus Tertentu Lainnya terkait Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa	Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Diklat & Bimtek Bagi Pegawai Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Inspektorat Daerah	Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Daerah	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Daerah	Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Daerah
STAKEHOLDER TERKAIT	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP 8. BPKP-RI 9. Kementerian Terkait 10. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan)	1. Masyarakat Umum 2. Bupati & Wakil Bupati Bone 3. Sekretaris Daerah Kab. Bone 4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 5. Pemerintah Desa 6. DPRD Kab. Bone 7. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan) 8. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat 9. Ombudsman RI 10. Kementerian Terkait	1. Bupati & Wakil Bupati Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 6. BPKP 7. BPKP-RI 8. Kementerian Terkait 9. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan)	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 6. BPKP 7. Kementerian Terkait 8. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan)	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 7. BPKP 8. BPKP-RI 9. Kementerian Terkait	1. Bupati & Wakil Bupati Kab. Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. BPKP-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Kab. Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. BPKP 5. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 6. Lembaga Diklat Resmi bagi ASN	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. DISKOMINFO Kab. Bone 4. BPKP 5. BPKP-RI 6. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati & Wakil Bupati Kab. Bone 2. BKAD Kab. Bone 3. UKPBJ Kab. Bone 4. BPKP 5. BPKP-RI 7. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati & Wakil Bupati Kab. Bone 2. BKAD Kab. Bone 3. UKPBJ Kab. Bone 4. BPKP 5. BPKP-RI	1. Bupati & Wakil Bupati Kab. Bone 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. UKPBJ Kab. Bone 5. BPKP 6. BPKP-RI 7. Penyedia Barang/Jasa	



LAMPIRAN 2

**Rumusan Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja
Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun
2023 (Cetakan SIPD)**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

LAMPIRAN 2

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH										16,766,422,900			21,115,000,000
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										13,324,203,900			16,702,500,000
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										45,783,000			79,500,000
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	5 Dokumen	100 %	34,456,750	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	40,000,000	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Dokumen	100 %	2,265,000	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	2,500,000	
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Dokumen	100 %	1,680,000	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	2,000,000	
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Dokumen	100 %	1,942,500	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	2,000,000	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	8 Dokumen	100 %	5,438,750	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	33,000,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,660,845,962			11,124,500,000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	26 Bulan	100 %	9,540,662,212	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	11,000,000,000	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/ Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Bulan	100 %	110,940,000	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	115,000,000	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Dokumen	100 %	1,255,000	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	1,500,000	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	25 Dokumen	100 %	7,988,750	Dana Perimbangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	8,000,000	
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										38,602,500			42,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	2 Dokumen	100 %	17,452,500	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	20,000,000
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	6 Dokumen	100 %	21,150,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	22,500,000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							970,656,000			1,120,000,000			
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	95 Buah	97 %	42,750,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	50,000,000
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	16 Dokumen	97 %	17,760,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	20,000,000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	55 Orang	97 %	523,750,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	700,000,000
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	2 PKS	97 %	386,396,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	350,000,000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							822,819,568			943,500,000			
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	4 Paket	97 %	6,128,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	7,500,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Paket	97 %	167,775,628	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	200,000,000
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	4 Paket	97 %	19,072,040	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	25,000,000
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Paket	97 %	25,028,400	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	50,000,000
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Paket	97 %	33,200,500	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Paket	97 %	26,100,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	35,000,000	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	120 Orang	97 %	41,100,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	50,000,000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	55 Kegiatan	97 %	482,015,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	500,000,000	
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Aplikasi 12 Bulan	97 %	22,400,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	36,000,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,247,017,750				2,650,000,000		
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Unit	70 %	513,850,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	1,500,000,000	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	2 Unit	70 %	50,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	575,000,000	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	154 Buah/Set	70 %	584,979,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	200,000,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Unit/Buah	70 %	73,788,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	300,000,000	
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Set	70 %	24,400,750	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	75,000,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								167,286,000				195,000,000		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	36 Paket	100 %	48,420,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	75,000,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	12 Bulan	100 %	118,866,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	120,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							371,193,120			547,500,000			
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	4 Paket	75 %	61,178,550	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	125,000,000
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	4 Paket	200 %	49,777,070	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	150,000,000
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Meubleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	75 Buah	200 %	6,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	7,500,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	87 Unit	200 %	49,570,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	55,000,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	3 Paket	200 %	189,667,500	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	190,000,000
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	3 Paket	200 %	15,000,000	Dana Perimbangan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis pada Inspektorat Daerah	95 Persen	20,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							3,011,889,000			3,667,500,000			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2,506,290,000			2,967,500,000			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	321 Laporan	90 %	1,227,455,000	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	1,500,000,000
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	172 Laporan	90 %	466,189,250	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	525,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	2 Laporan	90 %	18,992,500	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Laporan	90 %	10,958,750	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	17,500,000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	144 Laporan	90 %	416,977,000	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	450,000,000
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	1 Kegiatan	90 %	118,287,500	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	200,000,000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	90 Persen	4 Laporan Triwulan	90 %	247,430,000	Dana Perimbangan		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP.	95 Persen	250,000,000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								505,599,000				700,000,000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	98 Persen	2 Laporan Semester	90 %	182,215,000	Dana Perimbangan		Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.	99 Persen	225,000,000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	98 Persen	4 Laporan Triwulan	90 %	323,384,000	Dana Perimbangan		Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.	99 Persen	475,000,000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								430,330,000				745,000,000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								52,430,000				65,000,000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	24 KPA	100 %	52,430,000	Dana Perimbangan		Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 Persen	65,000,000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								377,900,000				680,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	85 Persen	10 Laporan	90 %	54,386,000	Dana Perimbangan		Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	95 Persen	100,000,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	85 Persen	3 Laporan	90 %	13,371,000	Dana Perimbangan		Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	95 Persen	35,000,000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	85 Persen	8 Laporan	90 %	280,616,500	Dana Perimbangan		Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	95 Persen	500,000,000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	85 Persen	4 Laporan	90 %	29,526,500	Dana Perimbangan		Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi atau menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	95 Persen	45,000,000
TOTAL													16,766,422,900					21,115,000,000